

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu pada operasi komersial menguntungkan yang dioperasikan oleh badan usaha atau individu. Kegiatan usaha ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena dapat menyediakan lapangan kerja dan memberi kontribusi yang signifikan untuk perekonomian Indonesia. UMKM memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan besar karena kemudahan penciptaan dan pengembangannya. Pengelolaan usaha dan penerapan manajemen berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Menurut Sulistyawati (2020) UMKM diharapkan oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah tugas menjaga keakuratan pencatatan keuangan dan menyusun laporan keuangan. Mereka terlalu memprioritaskan operasi manufaktur dan operasional, sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pelaporan keuangan.

Mengacu pada ungkapan Amelia (2023) Alasannya seperti kurangnya keahlian akuntansi, sistem yang terlalu susah, dan pandangan luas bahwasanya laporan keuangan adalah bagian kurang penting untuk UMKM. Mereka beranggapan usahanya tersebut masih tergolong kecil ataupun tidak dalam tahapan perkembangan, karenanya banyak UMKM yang masih belum memanfaatkan informasi akuntansi secara maksimal atau tidak mampu memberikan informasi akuntansi yang relevan dengan kondisi perusahaannya, hal inipun terjadi dikarenakan sejumlah aspek, satu diantaranya karena tidak diharuskan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Selaras dengan temuan Purwaningsih (2018) mengungkapkan setiap usaha yang dilakukan memerlukan laporan keuangan untuk perkembangan usahanya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan berguna untuk tujuan menetapkan keputusan-keputusan ekonomi, sehingga informasi akuntansi yang disajikan berguna bagi pihak terkait. Memiliki catatan keuangan yang akurat, seperti laporan keuangan, sangat penting bagi setiap bisnis. Manajer dan pihak berkepentingan lainnya mengandalkan laporan keuangan

untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta terkait pendapatan dan pengeluaran keuangan, serta untuk menilai kinerja perusahaan. Keunggulan tersebut diharapkan dapat menyadarkan para pemangku kepentingan UMKM akan pentingnya akuntansi bagi bisnisnya.

Dalam memahami pelaku UMKM, sosialisasi menjadi hal pertama yang perlu diperhatikan. Menurut Wati (2023) sosialisasi merupakan proses memperoleh ilmu pengetahuan keterampilan dan petunjuk atau arahan dari orang yang memiliki pengalaman dibidang tersebut, sehingga hasil dari proses sosialisasi tersebut bisa digunakan untuk keperluan baik dari segi usaha maupun masyarakat. Memperoleh sosialisasi tentang informasi akuntansi akan membuat mereka lebih paham lagi didalam penyusunan laporan keuangan

Faktor kedua yang memengaruhi pemahaman para pelaku UMKM yaitu pengalaman kerja. Semakin lama pengalaman kerja dalam bidang akuntansi semakin baik pengetahuan pemilik UMKM didalam merancang laporan keuangan berlandaskan SAK EMKM. Dengan memiliki keahlian akuntansi bisa membuat peningkatan bagi pemahaman pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM di kalangan pemilik UMKM. Hal inipun disebabkan oleh pemilik UMKM yang mempunyai pengalaman kerja dibidang akuntansi sudah memiliki pengetahuan mengenai manfaat laporan keuangan dan bisa merancang laporan keuangan yang dapat disesuaikan terhadap SAK EMKM.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pemahaman para pelaku UMKM yaitu latar belakang pendidikan. Menurut Prasetyo (2022) Dalam penyusunan laporan keuangan, latar belakang pendidikan pelaku UMKM departemen akuntansi akan menjadi pertimbangan. Individu yang mempunyai latar belakang akuntansi besar kemungkinannya mengerti SAK EMKM disandingkan mereka yang tidak memiliki pelatihan tersebut.

Studi inipun memakai *theory of planned behavior (TPB)* selaku acuan dari pelaksanaan studi ini. Sebuah teori sosiologi, teori ini mencoba meramalkan bagaimana orang akan bertindak. Faktor yang mendasari teori ini yakni keinginan

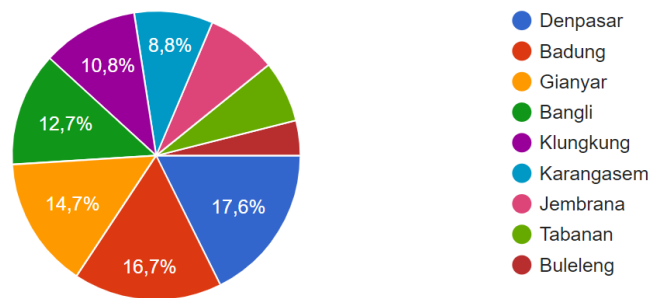
seseorang dalam melaksanakan perilaku tertentu. Tindakan manusia bisa terjadi dikarenakan rasa yakinnya tentang perilaku dan rasa yakin yang berlebihan tentang individu lain. Teori ini berkaitan dengan perilaku keuangan. Menurut Susanti et al (2022) Perilaku keuangan seseorang dapat didefinisikan sebagai pendekatannya terhadap, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangannya seperti menyusun anggaran, menyimpan uang dan pengendalian untuk membelanjakan, melakukan investasi, dan pembayaran kewajiban tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa individu yang mendapatkan sosialisasi, mempunyai hak pendidikan yang tepat, pengalaman kerja yang sesuai sangat erat kaitannya dengan perilaku keuangan. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar teori perilaku terencana dan menciptakan hubungan antara unsur-unsur yang memengaruhi pemahaman pemilik UMKM untuk merancang laporan keuangan yang merujuk kepada pemakaian SAK EMKM. Hubungan inipun terjalin jika pelaku UMKM melaksanakan perencanaan keuangan dengan perilaku keuangan yang dapat menunjang perencanaan keuangan usahanya untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik

Provinsi Bali luasnya tercatat 5.636,66 km atau 0.29% dari luas wilayah Indonesia yang terbagi atas sembilan Kabupaten/Kota; Kabupaten Badung, Bangli, Jembrana, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Denpasar, Tabanan. Kemenkominfo RI mengevaluasi keberadaan UMKM di Pulau Bali mengalami kemajuan yang pesat dan cepat. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali sangat inovatif dan memiliki kreatifitas tinggi yang menjadikan hal yang semula tidak ada nilainya dapat dirubahnya dijadikan karya seni bernilai tinggi. Banyaknya UMKM yang tercatat di Provinsi Bali, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu UMKM masih kesulitan dalam pengelolaan laporan keuangan.

Menurut Suastini (2018) menyatakan bahwa pencatatan akuntansi harus sesuai dengan setiap kejadian transaksi dikarenakan dalam menganalisis keadaan keuangannya dan kinerja usahanya, keadaan keuangan yang bagus wajib dibarengi oleh standar yang diberlakukan sejalan karakteristik bisnisnya. Dengan semakin

menjamurnya UMKM, maka persaingan bisnis pun semakin meningkat. Semakin cepat persaingan, semakin banyak uang yang dihasilkan perusahaan. Akibatnya, jumlah uang yang dikeluarkan untuk produksi biasanya setara dengan jumlah uang yang dihasilkan. Oleh karena itu, jumlah seluruh biaya yang berhubungan dengan produksi, rata-rata, akan sama dengan jumlah seluruh pendapatan yang didapatkan perusahaan. Karenanya, dalam skenario ini, suatu perusahaan tidak akan berhasil jika tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain. Semakin pesatnya kompetisi tersebut, tentu saja pelaku usaha memerlukan tambahan dana dalam pengembangan usahanya. Namun kenyataannya pelaku UMKM masih kesulitan melengkapi persyaratan dikarenakan kurangnya pemahaman didalam Menyusun laporan keuangan selaras terhadap syarat. Memahami dalam perancangan laporan keuangan ini berhubungan terhadap pengelolaan keuangan yang sering disebut dengan literasi keuangan.

Gambar 1. 1
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 2022

Dari diagram diatas Kabupaten dengan presentasi literasi keuangan tertinggi diduduki oleh Kota Denpasar dengan presentase 17,6% dan Kabupaten dengan presentasi literasi keuangan terendah diduduki oleh Kabupaten Buleleng dengan presentase 3,9%. Inipun selaras dengan temuan Suastini (2018) yang menyatakan bahwasanya pengelolaan keuangan di Kabupaten Buleleng belum baik. Hal ini

terjadi ketika pelaku usaha terlalu sibuk dengan urusan produksi dan operasionalnya serta mengabaikan pencatatan dan akuntansi karena memandang penyusunan laporan keuangan sebagai permasalahan yang kompleks. Banyak orang yang tidak memahami apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk mengembangkan bisnisnya karena tidak dapat mengevaluasi potensi yang dimilikinya. Kebanyakan pebisnis menanganinya dengan cara yang tidak profesional. Bisnis tidak diberikan arus kas yang sistematis dan terdokumentasi melalui hal ini. Laporan keuangan masih sering dianggap tabu di luar konteks tersebut. Akibat pelaku usaha menyembunyikan informasi yang relevan, laporan keuangan seringkali kurang rinci, dan banyak pemilik perusahaan yang gagal menyusun laporannya sesuai dengan norma industri.

Tabel 1. 1
Perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022

No	Klasifikasi Usaha	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Usaha Mikro	25.202	26.048	27.137
2	Usaha Kecil	9.157	9.311	9.593
3	Usaha Menengah	193	196	226
	Jumlah	34.552	35.555	36.956

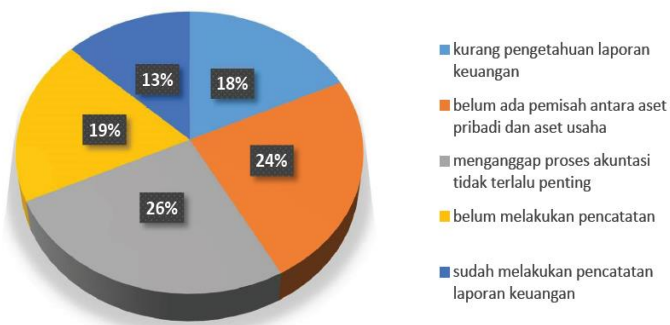
Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM Buleleng (2022)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menghadapi perkembangan dari tahun 2020-2022. Tahun 2020 UMKM sebanyak 34.552, pada tahun 2021 sebanyak 35.555, pada tahun 2022 sebanyak 36.956. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tergolong besar sehingga kontribusi dalam perekonomian Buleleng begitu dirasakan. Dari banyaknya jumlah UMKM yang terdata melakukan pencatatan keuangan hanya 13% dari total jumlah UMKM yang ada. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena mayoritas pelaku usaha terlalu fokus terhadap operasional sehari-hari

sehingga penyusunan laporan keuangan hanya sebatas pencatatan transaksi saja. Dunia usaha di Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan catatan keuangan yang akurat dan melaporkan aktivitas keuangan mereka kepada pemerintah. Undang-undang yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013 ini merupakan bagian dari upaya penegakan uu UMKM No. 20 Tahun 2008. Meskipun aturan ini sudah berlaku, banyak Pelaku UMKM gagal menyampaikan laporan keuangan.

Pelaku usaha di Kabupaten Buleleng mempunyai potensi pertumbuhan dan pengelolaan yang besar seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah. Namun, permasalahan besar bagi pelaku usaha adalah pemantauan pelaporan keuangan. Pelaku usaha masih kesulitan didalam merancang laporan keuangan menyesuaikan terhadap SAK EMKM karena prosesnya sulit dan memerlukan dukungan.

Gambar 1. 2
Data Permasalahan UMKM di Kabupaten Buleleng



Sumber: Penulis, diolah (2024)

Mayoritas pemilik usaha di Kabupaten Buleleng, mengacu kepada observasi lapangan, tidak menganggap prosedur akuntansi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaannya. Masih kurangnya kejelasan tentang bagaimana menggunakan keahlian akuntansi dalam pengelolaan keuangan. Tercatat ada banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan pencatatan terhadap laporan

keuangan usahanya secara maksimal, kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak terkait mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan, pengalaman kerja dibidang akuntansi yang kurang sehingga mereka kurang mengerti penyusunan laporan keuangan, Karena kurangnya pelatihan akuntansi, mereka tidak dapat memahami proses pembuatan laporan keuangan dan seringkali membatasi tugas pembukuan mereka hanya pada pencatatan uang masuk dan keluar. Banyak tokoh dunia usaha di Kabupaten Buleleng yang menyatakan keyakinannya terhadap kelangsungan dan profitabilitas perusahaannya tanpa adanya prosedur akuntansi. Amelia (2023) menyatakan bahwa persiapan yang tidak memadai, tujuan dan sasaran perusahaan yang tidak tepat, serta prospek masa depan yang kabur merupakan tantangan umum yang dihadapi para pelaku usaha. Bahkan ketika perusahaan mereka tidak berkembang, banyak pengusaha yang bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Daripada menampilkannya dalam angka nominal, mereka perlu menampilkannya dalam aset fisik ketika orang bertanya tentang keuntungan yang diperoleh setiap bulannya. Hal ini menyebabkan kaburnya visibilitas terhadap pertumbuhan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Merujuk pada ungkapan Purnamawati (2020) SAK EMKM disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang menyederhanakan pembukuan pelaporan keuangan UMKM. Hari pertama tahun 2018 menandai penerapan resmi aturan akuntansi keuangan ini. Standar akuntansi ini perlu dilaksanakan supaya bisa dengan mudahnya mengklasifikasi yang mana tergolong UMKM selaras dengan pasal 6 dalam UU no 20 (2008) terkait dengan kriteria UMKM. Penerapan SAK EMKM dapat menjadi faktor pendorong efektivitas pengelolaan pelaporan keuangan UMKM, sekaligus memudahkan akses mereka terhadap pendanaan dari lembaga keuangan. SAK EMKM adalah versi sederhana dari SAK ETAP.

Suastini (2018) menyatakan bahwa entitas yang tidak memegang tanggung jawab publik yang krusial namun sesuai dengan pengertian dan persyaratan UMKM diperbolehkan menggunakan SAK EMKM daripada SAK ETAP. Melalui

disahkannya SAK EMKM diharap akan memudahkan perusahaan untuk beralih dari akuntansi tunai ke akuntansi akrual. Ada tiga bagian dalam laporan SAK EMKM: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan pencatatan terkait laporan keuangan. Dasar pengukurannya hanya didasarkan pada biaya historis yang cukup untuk mendata aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan. Sedangkan dalam SAK ETAP terbagi atas beberapa bentuk bagian mencakup: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dengan dasar pengukuran metode nilai wajar yang artinya nilai tukar atau penyelesaian kewajiban dari pihak memiliki pengetahuan dan yang memiliki kepentingan untuk melakukan transaksi. Sebagian besar perusahaan UMKM masih belum mampu membuat laporan keuangan yang sinkron melalui menggunakan SAK ETAP, karenanya dipilihlah SAK EMKM. Dengan menerbitkan SAK EMKM, diharap bisa digunakan selaku pendorong penyusunan laporan keuangan untuk UMKM yang kemudian mempermudah UMKM dalam pengelolaan keuangan sehingga mempermudah memperoleh akses untuk pembiayaan dari perbankan.

Temuan yang dilaksanakan Wati (2023) menjelaskan bahwasanya sosialisasi berdampak positive signifikan untuk pemahaman UMKM saat merancang laporan keuangan merujuk kepada SAK EMKM. Inipun dikuatkan oleh temuan Adino (2019), Sari (2021), Fajriana (2023) dan Amelia (2023). Akan tetapi temuan Koto (2023) membuktikan hasil berbeda, sosialisasi tidak berdampak untuk memahami UMKM didalam merancang laporan keuangan selaras terhadap SAK EMKM, dan SAK ETAP (Prawesti, 2017).

Temuan yang dilaksanakan Wati (2023) menjelaskan pengalaman kerja berdampak positive untuk memahami UMKM saat merancang laporan keuangan menyesuaikan dengan SAK EMKM. Hasil inipun selaras dengan temuan Ratnawati et al (2020) dan Astuti et al (2023). Akan tetapi berbanding terbalik dengan hasil Marice (2019) dan Prayoga (2022) dimana pengalaman kerja tidak berdampak parsial untuk kemampuan membuat laporan keuangan bagi pelaku UMKM.

Hal inipun sejalan dengan temuan Maharani (2016) menjelaskan bahwasanya latar belakang pendidikan berdampak untuk pemahaman saat merancang laporan keuangan berlandaskan SAK EMKM. Hasil itupun dikuatkan oleh temuan Prawesti (2017), Dhila (2022), Anggraini (2023) dan Amelia (2023). Akan tetapi berbanding terbalik dengan temuan Sulistyawati (2020) dan Arnetta (2022) membuktikan latar belakang pendidikan tidak berdampak untuk pemahaman UMKM didalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada SAK EMKM.

Penelitian inipun merupakan pengembangan dari kajina studi Amelia (2023). Perbedaannya nampak pada variabel bebas yang diujikan, lokasi pelaksanaan kajian studi serta pengukuran dan teknik pengambilan sampel yang dipakai. Pada kajian studi ini, penulis mengujikan Sosialisasi, Pengalaman Kerja dan Latar Belakang Pendidikan yang berperan sebagai variabel bebas. Kemudian pemahaman penyusunan laporan keuangan berlandaskan SAK EMKM selaku variable terikatnya. Lokasi pelaksanaan studi ini yakni mengambil UMKM di Kabupaten Buleleng. Serta alasan peneliti memilih variabel itu dikarenakan peneliti ingin memfokuskan penelitian pada variabel sosialisasi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan yang dianggap menyumbang dampak bagi pemahaman ketika membuat laporan keuangan berlandaskan SAK EMKM. Serta memberikan wawasan lebih lanjut mengenai variabel bebas tersebut dan memberikan pandangan tentang sejauh mana implementasi SAK EMKM dapat diintegrasikan dengan variabel tersebut.

Berlandaskan pemaparan tersebut, peneliti berikinginan mengujikan topik tentang **“Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, demikian bisa diidentifikasi permasalahanya yakni:

1. Terdapat pelaku UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan menyesuaikan pada pedoman SAK EMKM
2. Dari total jumlah UMKM hanya 13% yang menyusun laporan keuangan
3. Banyak UMKM yang mengetahui perlunya menyampaikan laporan keuangan dari mulut ke mulut.
4. Banyak UMKM yang kesulitan memahami proses penyusunan laporan keuangan karena kurangnya pengalaman kerja.
5. Latar belakang pendidikan yang kurang bisa menyulitkan UMKM untuk memahami penyusunan laporan keuangan

1.3 Pembatasan Masalah

Studi ini memberi batasan masalah supaya penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Peneliti memberikan batasan masalah hanya dalam lingkup pengaruh sosialisasi, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan untuk pemahaman UMKM didalam merancang laporan keuangan sesuai SAK EMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan batasan permasalahan yang penulis pilih, demikian dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya yakni apakah:

1. Sosialisasi berpengaruh bagi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM?
2. Pengalaman kerja berpengaruh bagi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM?
3. Latar belakang pendidikan berpengaruh bagi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan bermaksud mengetahui pengaruh:

1. Sosialisasi bagi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM
2. Pengalaman kerja bagi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM
3. Latar belakang pendidikan bagi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan yang sudah diuraikan, demikian studi ini diharap bisa menyumbang manfaat dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan teoritis diharapkan temuan ini bisa memajukan pengetahuan dan wawasan terkait dengan UMKM supaya bisa mengimplementasikan akuntansi dan standar SAK EMKM didalam usaha mereka

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak UMKM

Bisa digunakan selaku informasi dan masukan bagi UMKM serta selaku pertimbangan ketika mengambil kebijakan cara pencatatan dan pelaporan yang selaras terhadap akuntansi dan menyesuaikan pada standar SAK EMKM.

b. Bagi Akademisi

Bisa dipergunakan selaku tambahan kepustakaan dan masukan untuk mahasiswa yang hendak mengujikan topik serupa.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi untuk masyarakat berkaitan pentingnya laporan keuangan dan implementasi SAK EMKM dalam bidang usaha.